



## **MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU MELALUI PENDIDIKAN DEMOKRASI**

**Muhammad Dimas Alfariysi, Nashrulloh Al Hasani, Siti Tiara Maulia**  
Universitas Jambi  
dhimasalfariysi33@gmail.com

### **Abstract**

*This article discusses the importance of high participation in the democratic process, especially in large-scale events such as elections, to ensure that citizens have the freedom to choose their leaders based on conscience. However, low participation, such as "golput" or the so-called white class, can pose a threat to democracy and diminish its essence. In this article, the author uses the literature study technique. The data used is secondary data, which is data that comes from books, theses, journals, or news on the internet. The discussion explained in this article is that there are many factors that affect people's political participation in elections, one of which is the lack of understanding or education of the community in elections. Therefore, an effort is needed to overcome this, one of which is by implementing democratic education for citizens. With the existence of democratic education in Indonesia, it is hoped that it can improve the quality of people's political participation so that later it can give birth to qualified prospective leaders as well.*

### **Article History**

Received: 15 Maret 2023  
Reviewed: 13 April 2023  
Published: 28 April 2023

### **Key Words**

*Political Participation,  
Elections, Democracy  
Education.*

### **Abstrak**

artikel ini membahas pentingnya partisipasi yang tinggi dalam proses demokrasi, terutama dalam acara berskala besar seperti pemilihan umum, untuk memastikan bahwa warga negara memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin mereka berdasarkan hati nurani. Namun, partisipasi yang rendah, seperti "golput" atau yang disebut sebagai golongan putih, dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan mengurangi esensinya. Dalam artikel ini, penulis menggunakan teknik studi literatur. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari buku-buku, skripsi, jurnal, ataupun berita yang ada di dalam internet. pembahasan yang dijelaskan dalam artikel ini adalah ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pemilu, salah satunya adalah minimnya tingkat pemahaman atau pendidikan masyarakat pada pemilu. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan menerapkan pendidikan demokrasi bagi warga negara. Dengan adanya pendidikan demokrasi di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat agar nantinya dapat melahirkan calon pemimpin yang berkualitas pula.

### **Sejarah Artikel**

Received: 15 Maret 2023  
Reviewed: 13 April 2023  
Published: 28 April 2023

### **Kata Kunci**

*Partisipasi Politik, Pemilu,  
Pendidikan Demokrasi*

### **Pendahuluan**

Di negara yang berorientasi pada paham demokrasi, sudah seharusnya memiliki daya partisipasi yang tinggi. Apalagi Ketika negara tengah menyiapkan pesta dengan skala besar, yaitu pesta demokrasi , dalam bentuk Pemilu. Dengan adanya pemilu ini, dapat menjadi bukti bahwa negara telah menyediakan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin mana yang layak sesuai hati nurani nya. (Saputra, 2020)

Berbicara mengenai pemilu, golput pada hakikatnya musuh terbesar bagi demokrasi itu sendiri. Mengapa demikian, kehadiran golput atau yang sering disebut sebagai golongan



putih ini dapat mengancam status demokrasi di suatu negara, dan dapat menurunkan esensi dari demokrasi, seperti halnya di Indonesia yang memiliki catatan sejarah yang cukup Panjang. Jika diulas secara seksama, Indonesia telah beberapa kali melaksanakan pemilihan umum sejak tahun 1955 hingga 2019, namun masyarakat cenderung tidak menggunakan suara nya dengan utuh atau mengoptimalkan hak pilihnya, bahkan hal ini kian meningkat setiap kali pelaksanaan pemilu. (Saputra, 2020)

Partisipasi tidak hanya memberikan ruang pada masyarakat untuk memberikan suaranya Ketika proses pemilihan umum, akan tetapi perwujudan nyata dalam bentuk luas, seperti bagaimana mereka ikut serta dalam pengambilan keputusan dan bagaimana cara mereka untuk mengkoordinir pelaksanaan kebijakan serta lebih mengoptimalkan publik terkait hat dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Jika partisipasi masyarakat pada proses pemilu tergolong rendah, ini akan menjadi masalah yang serius. Banyak sekali berbagai pihak yang terkena imbasnya, dimulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu dan organisasi non-pemerintah.

Jika dilihat secara seksama, ada beragam alasan mengapa masyarakat cenderung pasif dalam berpartisipasi pada pemilu, yaitu rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik, tinggi nya politik “imbal jasa” yaitu masyarakat akan memberikan hak pilihnya jika diberi sebuah imbalan, dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai politik (Husna & Fahrimal, 2021)

Rendahnya kualitas partisipasi masyarakat pada pemilu ini banyak dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mereka tentang pemilu dan demokrasi itu sendiri. Mereka cenderung berumpama bahwa yang mengatur system itu adalah pemerintah, dan bukan menjadi urusan mereka. Ketika seorang pemimpin telah terpilih, lalu performanya tidak sesuai dengan ekpekstasi mereka, pada akhirnya timbullah perasaaan kecewa akibat realitas yang dirasakan yang kemudian melahirkan perilaku sikap apatis politik. (Husna & Fahrimal, 2021)

Indonesia sebagai salah satu negara yang berpegang pada paham demokrasi sudah seharusnya dapat memaksimalkan partisipasi besar oleh masyarakatnya. Terlebih lagi Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa yang tersebar di berbagai belahan pulau, dan dengan jumlah yang sangat banyak ini sangat berpotensi mengangkat Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Tentu hal ini diperlukan upaya yang maksimal agar partisipasi masyarakat terus meningkat.

Salah satu upaya nya ialah melalui pendidikan demokrasi. Zamroni mengatakan bahwa pendidikan demokrasi harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis tanpa manusia yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi, masyarakat yang demokratis hanya akan merupakan impian belaka.

Pendidikan demokrasi pada hakikatnya pengenalan nilai-nilai demokrasi agar mampu dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi juga merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh negara untuk memfasilitasi warga negara nya agar mampu memahami, mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai dari demokrasi sesuai dengan perannya di masyarakat. (Muhammad Sobri, 2022)



Pendidikan demokratis adalah Pendidikan yang memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang demokratis, yaitu individu yang mampu memahami , menghargai, dan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu pendidikan demokrasi juga berfungsi untuk membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional. Selain itu, pendidikan demokrasi juga berfungsi sebagai pembentuk karakter dan sikap kritis serta toleran terhadap perbedaan dan keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat. (Nur & Sudarsono, 2019).

## **METODE**

Informasi adalah data yang telah di olah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan memiliki nilai bagi pengambilan keputusan saat ini atau dimasa yang akan datang (Fairuzabdi, 2021). Informasi tidak hanya dianggap sebagai sarana pengetahuan, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Bahkan manusia sangat memerlukan informasi sebelum mereka mengambil keputusan agar tepat dan sesuai yang diharapkan. Informasi ini tersebar banyak sekali, dan dapat ditemukan darimana saja, seperti dari buku, internet, sekolah, lingkungan, bahkan tempat di sekitar kita.

Di dalam penelitian, Teknik pengumpulan data memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah penelitian itu. Dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang tepat, maka dapat membantu peneliti mendapatkan sebuah data yang valid dan relevan.

Dalam artikel ini, metode yang digunakan ialah metode Studi Literatur. Metode studi literatur ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian (Fadli, 2021). Data yang akan digunakan untuk mengumpulkan data adalah data sekunder, yaitu data yang didapat melalui buku-buku, jurnal, skripsi maupun berita. Setelah data-data tadi dikumpulkan, lalu akan ditinjau lebih lanjut agar dapat disusun Kembali.

## **Pembahasan**

Setelah memasuki masa ordebaru, system pemilihan di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Pemilu atau pemilihan umum adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh negara sebagai ruang bagi masyarakat nya untuk dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria ataupun kehendaknya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



---

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu atau pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (Indonesia, 2012).

Secara teori, pemilu merupakan Langkah awal dari beberapa uraian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu sering dianggap sebagai motor penggerak system politik Indonesia, tak heran proses ini melibatkan seluruh warga negara secara langsung. Dan juga dengan adanya pemilu ini pula rakyat dapat mengemukakan aspirasi nya dalam dunia politik. Pemilu ini memiliki lima tujuan dilihat dari pelaksanaannya, yaitu :

Pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, artinya kedaulatan itu terletak di tangan rakyat. Dengan adanya pemilu, rakyat bisa menentukan wakil-wakil nya, yang nantinya para wakil tersebut juga akan menampung aspirasi rakyat dan menentukan siapa yang layak memegang system pemerintahan.

- a. Pemilu sebagai sarana pembentuk perwakilan politik. Semakin tinggi kualitas pemilu, maka semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang terpilih .
- b. Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Melalui pemilu, pemerintahan yang bagus dan aspiratif akan meningkatkan tingkat kepercayaan rakyat untuk memimpin Kembali. Namun sebaliknya, jika rakyat sudah tidak memiliki rasa percaya terhadap pemimpin tersebut, maka pemerintahan harus berakhir.
- c. Pemilu sebagai wadah pemimpin politik untuk memperoleh validitas. Pemberian suara pada dasarnya merupakan pemberian janji rakyat atau aspirasi yang harus dipenuhi kepada pemimpin untuk menjalankan pemerintahannya. Pemimpin politik terpilih mendapatkan legitimasi politik rakyat atau validitasnya.
- d. Pemilu sebagai penyedia ruang partisipasi bagi masyarakat. Pada hakikatnya pemilu diselenggarakan untuk menampung aspirasi masyarakat kepada negara. Melalui pemilu ini pula rakyat secara langsung memilih calon pemimpin sesuai dengan hati nuraninya. Yang mana pemimpin yang terpilih harus merealisasikan janji-janjinya Ketika memegang tonggak pemerintahan. Secara singkat, tujuan pemilu ialah membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan kuat dari rakyat sebagai bentuk pengimplementasian dari tujuan nasional sesuai UUD 1945.



---

Pemilu saling berkaitan erat dengan “partisipasi politik”. Partisipasi adalah keikutsertaan individu baik secara mental, pikiran ataupun emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab atas kegiatan pencapaian tersebut (Adi, 2013).

Menurut Michael Rush dan Philip Althoft, partisipasi politik diibaratkan sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi prose pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh warga negara dalam keikutsertaan proses pelaksanaan kebijakan umum dapat digolongkan sebagai bentuk dari kegiatan partisipasi politik (Arniti, 2020)

Partisipasi politik memiliki hubungan antara kesadaran politik dengan kepercayaan kepada pemerintahan. Partisipasi politik erat hubungannya dengan demokrasi karena berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Setiap masyarakat memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menentukan pilihan mereka sendiri. Tidak sampai disitu, partisipasi politik dipandang sebagai panduan masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Panduan atau control yang diberikan juga beragam, tergantung dari tingkat partisipasi politik itu masing-masing.

Alat ukur partisipasi warga negara Indonesia dapat dilihat melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat diketahui dari berbagai jenis, salah satunya dapat dilihat melalui antusiasme masyarakat yang mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum. Berdasarkan pelaksanaannya, partisipasi dibedakan menjadi dua macam, yakni partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Hal ini didasarkan pada pendapat Parfit yang mengemukakan bahwa “Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai dukungan rakyat dengan ukuran kemauan masyarakat untuk ikut menanggung dan berperan dalam pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung”. Dengan demikian, partisipasi politik sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan pemilu, jika kualitas partisipasi politik rendah, maka akan berdampak pada keberlangsungan pemilu tersebut. Begitupun sebaliknya. Jika kualitas partisipasi politik masyarakat tinggi, maka dapat melahirkan calon pemimpin yang baik pula.

Namun, partisipasi masyarakat tak sepenuhnya berjalan lancar. Ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat, seperti rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik, tingginya politik “imbal jasa” yaitu masyarakat



---

akan memberikan hak pilihnya jika diberi sebuah imbalan, dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai politik. (Husna & Fahrimal, 2021) Selain itu, kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan minimnya pengetahuan mengenai pemilu dan demokrasi juga menjadi faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat.

Imam Prasetya menyebutkan bahwa “ tingkat partisipasi seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah pendidikan. Orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan mempunyai wawasan dan pengetahuan yang lebih tinggi pula daripada orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Sehingga partisipasi diberikan oleh orang yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih besar daripada orang yang berpendidikan rendah.” .

Pengamat politik dari Universitas Widya Mandira Kupang (Urbanus Hurek) juga berpendapat mengenai penyebab-penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum.

- a. Yang pertama adalah figure pemimpin yang diajukan dalam pemilu kurang berkenan di hati pemilih.
- b. Yang kedua, pemilih mulai jenuh dengan proses demokrasi lima tahunan yang tidak membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat.
- c. Yang ketiga, pemilu tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang prioritas atau sangat diperlukan dalam membangun kehidupannya sehari-hari.

Jika hal ini dibiarkan lebih lanjut, maka dapat melunturkan nilai dari pemilu dan demokrasi itu. Dan juga rendahnya partisipasi politik menyebabkan kualitas calon pemimpin yang tidak sesuai yang akibatnya tingkat pemerintahan menjadi tidak beraturan dan aspirasi yang diminta rakyat pun tidak terpenuhi dengan maksimal. Untuk mengantisipasi rendahnya partisipasi politik masyarakat, diperlukan adanya upaya yang dapat meningkatkan tingkat partisipasi agar nantinya dapat melahirkan calon pemimpin yang berkualitas. Salah satunya adalah melalui pendidikan demokrasi.

Pendidikan demokrasi merupakan sebagian upaya untuk menumbuhkan serta mengembangkan pengetahuan, sikap, serta keterampilan demokratis. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Winataputra dan Budimansyah “pendidikan demokrasi dalam berbagai konteks dalam hal ini untuk pendidikan formal (di sekolah), non formal (pendidikan di luar



---

sekolah), dan informal (pergaulan di rumah dan masyarakat) mempunyai visi sebagai wahana substantive , pedagogis, dan sosialkultural untuk membangun cita-cita, nilai dan konsep, prinsip, sikap dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan kehidupan demokrasi dalam berbagai konteks”.

Sedangkan, Zamroni mendefinisikan pendidikan demokrasi lebih khusus, yaitu pendidikan demokrasi dapat dilihat sebagai proses memberikan kesempatan kepada para siswa guna mempraktikkan kehidupan yang demokratis baik di kelas, di sekolah, maupun masyarakat, dengan tujuan agar para siswa memahami bagaimana proses politik suatu negara berlangsung sehingga berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan demokrasi ini adalah sebuah usaha sadar yang dilakukan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap demokratis baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, yang mana nilai dan sikap demokratis kedepannya akan berguna bagi dirinya sendiri untuk ikut serta aktif dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara esensial, pendidikan demokrasi ini memiliki tujuan untuk membangun budaya demokrasi baru untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang ideal. Demokrasi tidak sekedar dari trias politica belaka, demokrasi lebih dari itu. Di dalam demokrasi menyangkut kondisi yang kondusif untuk mensosialisasikan pendidikan nilai-nilai yang menjadi harapan dan dambaan. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi harus mampu melakukan inovasi-inovasi yang baru untuk kemajuan demokrasi. (Pusposari, 2017). Usaha yang sungguh-sungguh dalam mengimplementasikan pendidikan demokrasi harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat sehingga melahirkan budaya demokrasi yang semakin dinamis dan mendapat porsi perhatian yang lebih besar.

Pendidikan demokrasi pada hakikatnya memandu atau membimbing peserta didik ataupun masyarakat dalam berdemokrasi melalui sosialisasi nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya dapat mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dalam pendidikan demokrasi, ada dua hal yang sangat ditekankan, yaitu demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis. Sebagai konsep memiliki makna dan sikap perilaku yang tergolong sikap demokratis, sedangkan praksis adalah demokrasi yang sudah menjadi sistem.



Dalam proses mensosialisasikan nilai demokrasi, diperlukan adanya komitmen dari para elit politik, tokoh masyarakat, guru, stake holders pendidikan demokrasi, dan seluruh masyarakat. Pendidikan demokrasi harus memperhatikan nilai-nilai secara holistic maupun universal. Tingkat keberhasilan pendidikan demokrasi ditandai dengan keluaran menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan sosial yang demokratis dan dinamis sehingga mampu menghasilkan warga negara yang baik (good citizen). Selain itu, kesuksesan pendidikan demokrasi juga dapat diukur melalui penguasaan nilai-nilai IPTEKS dan soft skill , yaitu kemampuan bekerja kelompok secara egalitarian, memimpin demokrasi, kemampuan berkoordinasi, tabah dan gigih, percaya diri, dan memiliki nilai-nilai nasionalisme untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis (Sofian, Kedaulatan rakyat, 19 agustus 2005).

## **KESIMPULAN**

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga merupakan salah satu faktor rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum. Serta masalah lain yang timbul yaitu terjadinya golput (golongan putih), karena dapat mengancam demokrasi di suatu negara dan menurunkan esensi demokrasi.

Pendidikan demokrasi memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang demokratis, yaitu individu yang mampu memahami , menghargai, dan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu pendidikan demokrasi juga berfungsi untuk membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional.

Pendidikan demokrasi pada hakikatnya pengenalan nilai-nilai demokrasi agar mampu dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi juga merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh negara untuk memfasilitasi warga negara nya agar mampu memahami, mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai dari demokrasi sesuai dengan perannya di masyarakat.



## Saran

Golput atau golongan putih seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah sebagai penyelenggara pemilu dan partai politik. Program kerja seperti sosialisasi kepada masyarakat untuk penguatan demokrasi harus di tingkatkan. Terutama bagi wilayah yang memiliki tingkat dan kesadaran demokrasi rendah dan juga pemerintah juga harus memberi contoh yang baik untuk rakyatnya. Selain itu, penerapan Pendidikan demokrasi di kalangan masyarakat merupakan salah satu upaya terbaik dalam meningkatkan partisipasi politik.

## Daftar Pustaka

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4, 329-348.
- Asmaul Husna, Y. F. (2021). Pendidikan Politik : Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: darma bakti Teuku Umar*, 85-100.
- dkk, M. E. (2012). Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat oleh Relawan Demokrasi Basis Warganet pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Padang. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 39-47.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika*, 33-54.
- Faizuabdi, M. (2021). Konsep Dasar Data, Informasi, Pengetahuan. 9-30.
- Firda Puspa, R. R. (t.thn.). DEMOKRASI PENDIDIKAN.
- Kartoni. (2022). Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1-19.
- Kusrahmadi, S. (t.thn.). PENTINGNYA PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT SIPIL (Civil Society). 1-19.
- Liando, D. M. (2016). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ( Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014 ). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 14-28.
- Muhammad Sobri, U. (2022). Implementasi Pendidikan Demokrasi di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 6174-6181.
- Pusposari, D. (t.thn.). PENDIDIKAN YANG DEMOKRATIS DALAM ERA GLOBAL. *Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Konteks Global*, 83-98.
- Rizki Ramdani, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan DEWANTARA*, 9034-9038.
- Sundari, F. W. (2017). FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI TAHUN 2015. *JOM FISIP*, 1-15.
- Tarigan, S. A. (t.thn.). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK.
- WARSUDIN, D. (2016). Optimalisasi Kpu Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu. *JURNAL ILMU HUKUM LITIGASI*, 1995-2030.



**Civilia :**

**Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan**

**ISSN : 2961-8754**

<http://jurnal.anfa.co.id>

*Bulan, 3 Tahun 2023*

*Vol 3 , No 1 .*

---

Inilah 3 Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik. (2012). Inilah 3 Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik | Republika Online

Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia. (2021). <https://www.uui.ac.id/meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat-indonesia/>

Pengertian Pemilu. (2022). <https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu#:~:text=Pemilu%20adalah%20sarana%20pelaksanaan%20kedaulatan,Dasar%20Negara%20Republik%20Indonesia%201945>

Lampiran UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH